

**PERJANJIAN KERJA SAMA PELAKSANAAN
POS BANTUAN HUKUM PEMASYARAKATAN
(UNTUK PIHAK KESATU)**



**PERJANJIAN KERJA SAMA
KEPALA LPKA KELAS II LOMBOK TENGAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN

**PERKUMPULAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK
NUSA TENGGARA BARAT (NTB)
NOMOR : W21.PAS.PAS.6-TI.04.02- 301**

TENTANG

PELAKSANAAN POS BANTUAN HUKUM PEMASYARAKATAN

Pada hari ini Kamis tanggal 9 Maret Tahun 2023 di Mataram,
yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Moh. Nur, Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lombok Tengah, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Jl. Tojong-Ojong Desa Selebung Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah; dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPKA Kelas II Lombok Tengah, selanjutnya disebut "PIHAK KESATU".
- II. Sahan, S.H, Ketua LPA NTB, berkedudukan dan berkantor di Jln. Kesehatan Indrakila No 8, Pajang Timur, RT 01 RW 03, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat; dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Perlindungan Anak NTB, selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama mohon disebut sebagai "PARA PIHAK" yang kesemuanya terlebih dahulu menjelaskan:

- a. Bahwa LPKA Kelas II Lombok Tengah mempunyai tugas menyelenggarakan Pos Bantuan Hukum Pemasyarakatan;
- b. Bahwa Pemberi Bantuan Hukum mempunyai tugas memberikan bantuan hukum bagi pemohon bantuan hukum.

Dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK dengan ini sepakat membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Pemasyarakatan kepada tahanan anak, oleh Pemberi Bantuan Hukum, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar PARA PIHAK dalam

berkoordinasi untuk menyelenggarakan Pos Bantuan Hukum Pemasarakatan bagi tahanan anak;

- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menjalin kerja sama dan komunikasi bagi PARA PIHAK secara terpadu demi terlaksananya akses bantuan hukum melalui Pos Bantuan Hukum Pemasarakatan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama layanan penyuluhan hukum dan pemberian bantuan hukum kepada tahanan anak oleh Pemberi Bantuan Hukum;
- (2) PIHAK KEDUA menjamin hak setiap tahanan anak khususnya yang menghadapi masalah hukum dengan ancaman hukuman di atas 5 (lima) tahun maupun di bawah 5 (lima) tahun untuk mendapatkan akses bantuan hukum;
- (3) PIHAK KEDUA memberikan rujukan kepada anak tahanan miskin yang menghadapi permasalahan hukum baik perkara pidana, perkara perdata, perkara tata usaha negara pada tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi sampai peninjauan kembali;
- (4) PARA PIHAK melakukan sosialisasi bantuan hukum berupa pemberdayaan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak hari dantanggal penandatanganan oleh PARA PIHAK dan dapat ditinjau kembali;

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KEDUA berhak menggunakan ruang Pos Bantuan Hukum Pemasarakatan yang disediakan PIHAK KESATU;
- (2) PIHAK KEDUA berhak memperoleh informasi tentang anak tahanan yang membutuhkan bantuan hukum dari PIHAK KESATU;
- (3) PIHAK KEDUA berhak memperoleh jadwal pemberian bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum Pemasarakatan dari PIHAK KESATU;
- (4) PIHAK KEDUA wajib mengikuti jadwal pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Pemasarakatan sebagaimana telah disepakati dengan PIHAK KESATU;
- (5) PIHAK KEDUA wajib memberikan bantuan hukum secara profesional dan bertanggung jawab;
- (6) PIHAK KEDUA wajib mematuhi tata tertib yang berlaku;
- (7) PIHAK KEDUA wajib memberikan informasi hukum secara jelas dan akurat kepada pemohon bantuan hukum;
- (8) PIHAK KEDUA wajib memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa;
- (9) PIHAK KEDUA wajib memberikan konsultasi maupun nasihat hukum yang objektif dan komprehensif;
- (10) PIHAK KEDUA wajib merahasiakan keterangan maupun dokumen dalam bentuk apapun berkaitan dengan pemohon bantuan hukum;
- (11) PIHAK KEDUA wajib menyampaikan pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Pemasarakatan kepada PIHAK KESATU;
- (12) PIHAK KEDUA setiap 1 (satu) bulan sekali wajib membuat laporan pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Pemasarakatan kepada PIHAK KESATU;

Pasal 5

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dilandasi itikad baik, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum

proses musyawarah mufakat;

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk addendum serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 9 Maret 2023

PIHAK KESATU
KEPALA



PERGAYOMAN
DAN HAK ASASI MANUSIA RI
MUSUS ANAK KELAS LOMBOK TEGAH

PIHAK KEDUA



SAHAN, SH